

ABSTRAK

Penelitian mengenai Tujuan ke-16 dari Sustainable Development Goals (SDGs) berfokus memajukan masyarakat yang damai dan inklusif, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua orang, dan menjamin tata kelola kelembagaan dan pembangunan yang efektif dan akuntabel di semua level agar mencapai kemakmuran yang berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan tujuan ke 16 tersebut kebijakan non-penal menjadi penting. Kebijakan non-penal bertujuan untuk mencegah kejahatan sebelum terjadi dengan mengatasi faktor penyebabnya. Pendekatan ini mencakup pendidikan, kampanye kesadaran, dan reformasi sosial yang dirancang untuk meminimalkan peluang terjadinya kejahatan. Dalam kerangka itulah rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana pencegahan dan penanganan tindak pidana dalam rangka mewujudkan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh (tujuan ke-16) pada SDGs di desa Dasok, Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan eksploratif. Menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kelembagaan di pemerintahan desa Dasok sudah menentukan kebijakan-kebiakan yang mengarah pada untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan dan pembangunan yang efektif serta akuntabel di semua level agar mencapai kemakmuran yang berkelanjutan. Beberapa hal yang penting untuk diketahui dalam penelitian ini adalah apakah ada transparansi, komunikasi dan aspiratif bagi keinginan masyarakat. Program yang dirumuskan diharapkan jangan sampai masyarakat merasa tidak memperoleh keadilan sehingga membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan kejahatan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan oleh desa Dasok yakni dengan penyuluhan yang bertujuan untuk memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana desa, transparansi dan akuntabilitas, keterlibatan masyarakat, penguatan kelembagaan yang merupakan langkah penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana desa dan yang terakhir ada monitoring dari setiap program yang dijalaninya dengan sistem monitoring yang kuat, evaluasi yang objektif, dan transparansi dalam pelaporan, penggunaan dana desa dapat diawasi dan diperbaiki.

Kata Kunci: *Sustainable Development Goals (SDGs), tujuan ke-16, kebijakan non-penal.*

ABSTRACT

Research to achieve sustainable prosperity. In an effort to realize the 16th goal, non-penal policies are important. Non-penal policies aim to prevent crime before it occurs by addressing the causal factors. This approach includes education, awareness campaigns, and social reforms designed to minimize the opportunities for crime to occur. Within this framework, the formulation of the problem in the research is how to prevent and handle criminal acts in order to realize peace, justice and strong institutions (goal 16) in the SDGs in Dasok village, Pademawu District, Pamekasan Regency.

This type of research is sociological juridical with an exploratory approach. Using primary and secondary data sources. Data were obtained by conducting interviews and analyzed qualitatively. This study aims to determine whether the institutions in the Dasok village government have determined policies that lead to realizing effective and accountable institutional and development governance at all levels in order to achieve sustainable prosperity. Some important things to know in this study are whether there is transparency, communication and aspiration for the wishes of the community. The formulated program is expected not to make the community feel that they are not getting justice so that it opens up opportunities for the community to commit crimes. In this study, it was found that the prevention efforts carried out by the Dasok village were through counseling aimed at providing direct information to the community regarding the management of village funds, transparency and accountability, community involvement, strengthening institutions which are important steps in preventing criminal acts of corruption of village funds and finally there is monitoring of each program that is carried out with a strong monitoring system, objective evaluation, and transparency in reporting, the use of village funds can be monitored and improved.

Keywords: *Sustainable Development Goals (SDGs), goal 16, non-penal policy.*